

## Daftar Bacaan

### Buku

Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010;

Ateng Syarifudin, "Kepala Daerah", Cet. Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994

Halim, Abdul dan Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013;

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;

Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996;

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2016

Nugraha, Safri, *Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, BPHN, Jakarta, Desember 2007;

Pratiwi, Cekli Setya, *et al.*, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Hukum Administrasi Negara*, Judicial Sector Support Program, Jakarta;

Purwosusilo, H., *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media, 2017

Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;

Ramli, Samsul. *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Visimedia, Jakarta, 2013;

Wardianto, Bintoro, *Kebijakan E-Procurement*, Revka Petra Media, Surabaya, 2012;

### **Jurnal**

Muhyiddin, Covid-19, 'New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia', *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. IV, No. 2, 2020, h.12

KPK, *Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

Agus Prabowo, 'Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah', *Jurnal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP*, Vol. 1 No. 1, 2011

Indonesia Corruption Watch, *Panduan Pemantauan Belanja Barang dan Jasa (PBJ) dan Jaring Pengaman Sosial (Bansos) dalam Penanganan Covid-19*, 2020

Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986\

Dharmakarja, I Gede Made Artha, *Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial*, *Jurnal Substansi*, Politeknik Keuangan Negara STAN, Terakreditasi Dikti Sinta 4, Volume 1 Nomor 2, 2017

Pane, Musa Darwin. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 24.2 (2018): 147-155.

### **Daftar Peraturan Perundangan-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  
[Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473];

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan  
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus  
Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang  
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi  
Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020];

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan  
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33  
Tahun 2018]

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);